



RENCANA KERJA (RENJA)

**KANTOR KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Halong Tahun 2022 dapat dibuat.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Halong Tahun 2022 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Pembuaian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Halong Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Halong Tahun 2022 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Halong, 08 Juli 2021



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi SKPD, Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Rencana Kerja Kantor Kecamatan Halong Tahun 2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Proses penyusunan Renja Kantor Kecamatan Halong Tahun 2022 didasarkan kepada Renstra Kantor Kecamatan Halong Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022.

Kantor Kecamatan Halong memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”*** dengan tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Halong ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”***.

Tahun Anggaran 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan RENSTRA Kantor Kecamatan Halong Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RENJA Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana dan pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Halong Tahun 2022 mengacu pada landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2022 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Halong dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Halong Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Halong Tahun 2021-2026 dalam rencana Program/kegiatan Kantor Kecamatan Halong Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kantor Kecamatan Halong Tahun Anggaran 2022;
- c. Menciptakan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Kasi dan sekretariat Kantor Kecamatan Halong;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Kantor Kecamatan Halong.

2. Tujuan

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Kasi-kasi dan Sekretariat pada Kantor Kecamatan Halong.
6. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Halong Tahun 2021 yang didasarkan pada Renstra Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Halong; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan tahun 2020 dengan tahun 2021, jumlah program mengalami banyak perubahan, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri No 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dari program hingga sub kegiatan. Pada tahun 2020 jumlah program sebanyak 13 (tiga belas) program sedangkan pada tahun 2021 hanya terdiri dari 4 (empat) program. Sedangkan untuk jumlah kegiatan, pada tahun 2020 ada 37 kegiatan, sedangkan di tahun 2021 berkurang menjadi 11 kegiatan. Dan pada tahun 2021 dengan adanya nomenklatur baru karena diatur sampai sub kegiatan, pada tahun 2021 terdapat 22 Sub Kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sangat baik, yaitu sebesar Rp. 1.315.723.813,- atau sebesar 91,25% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 1.441.826.562,-

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Program Kegiatan Kecamatan Halong Berdasarkan
Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	515,809,698	474,936,249	92.08%	100.00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34,200,000	18,056,924	52.80%	100.00%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,405,000	84,726,520	87.89%	100.00%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49,981,000	43,272,000	86.58%	100.00%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12,000,000	11,800,000	98.33%	100.00%
	Penyediaan alat tulis kantor	17,217,600	16,481,000	95.72%	100.00%

	Penyediaan barang cetak dan pengemasan	6,185,000	6,097,500	98.59%	100.00%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,056,000	3,851,000	94.95%	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,500,000	23,502,500	88.69%	100.00%
	Penyediaan makanan dan minuman	44,250,000	42,860,000	96.86%	100.00%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65,015,098	64,308,805	98.91%	100.00%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	160,000,000	159,980,000	99.99%	100.00%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,805,000	192,317,900	89.95%	100.00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	38,600,000	38,600,000	100.00%	100.00%
	Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / dinas	2,400,000	2,346,000	97.75%	100.00%
	Pengadaan mebeleur	9,405,000	8,850,000	94.10%	100.00%
	Pengadaan computer	82,000,000	70,500,000	85.98%	100.00%
	Pengadaan alat-alat studio	10,000,000	9,500,000	95.00%	100.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,200,000	19,459,000	77.22%	100.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40,200,000	37,241,900	92.64%	100.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,000,000	5,821,000	97.02%	100.00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7,000,000	6,600,000	94.29%	100.00%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	7,000,000	6,600,000	94.29%	100.00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	106,270,664	88,450,664	83.23%	100.00%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	106,270,664	88,450,664	83.23%	66.67%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	6,962,100	6,709,000	96.36%	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	1,780,000	1,740,000	97.75%	100.00%
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	2,502,000	2,289,000	91.49%	100.00%

	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	2,680,100	2,680,000	100.00%	100.00%
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	69,250,000	57,940,000	83.67%	50.00%
	Lomba Desa/Kelurahan	8,850,000	-	0.00%	0.00%
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	60,400,000	57,940,000	95.93%	100.00%
7	Program penataan peraturan perundang-undangan	9,450,000	8,850,000	93.65%	100.00%
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	9,450,000	8,850,000	93.65%	100.00%
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	74,659,100	66,430,000	88.98%	100.00%
	Peringatan Hari Jadi Kabupaten	41,009,100	35,815,000	87.33%	100.00%
	Peringatan hari-hari besar daerah dan nasional	33,650,000	30,615,000	90.98%	100.00%
9	Program peningkatan pelayanan masyarakat	14,850,000	14,350,000	96.63%	100.00%
	Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang peningkatan kesehatan masyarakat	14,850,000	14,350,000	96.63%	100.00%
10	Program Operasional Kecamatan	71,850,000	63,720,000	88.68%	103.68%
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	71,850,000	63,720,000	88.68%	100.00%
11	Program pembinaan keagamaan dan masyarakat	24,950,000	8,450,000	33.87%	50.00%
	Penyelenggaraan Pelaksanaan kegiatan MTQ	24,950,000	8,450,000	33.87%	50.00%
12	Pembinaan dan Penguatan kelembagaan RT	315,000,000	315,000,000	100.00%	100.00%
	Pembinaan administrasi RT	315,000,000	315,000,000	100.00%	100.00%
13	Peningkatan pemantauan dan pelaksanaan pembangunan	11,970,000	11,970,000	100.00%	100.00%
	Pelaksanaan musrenbang kecamatan	11,970,000	11,970,000	100.00%	100.00%
	JUMLAH	1,441,826,562	1,315,723,813	91.25%	

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Halong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2019						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan								
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)	(10)		(11)							
4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																			
4	01	Administrasi Pemerintahan																			
4	01	KECAMATAN HALONG																			
4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 0	%	56.9	%	100	%	100	%	100.00	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	%	71.13	%	78.89	%

																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik, air dan telpon	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	60	bulan	83.33	%
																Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						84	Bulan	56	bulan	14		14				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	70	bulan	83.33	%
4	01	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	bulan	60	bulan	83.33	%
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	6	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Paket	5	Paket	83.33	%
																Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	38 0	buah	160	bunh	46	buah	46	bunh	100	%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27	buah	206	buah	54.21	%

4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	142	buah	80	buah	4	buah	4	buah	100	%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	buah	84	buah	59.15	%
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik	100	%	55.3	%	100	%	100	%	100.00	%		100	%	100	%	77.00	%
																Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	10	buah	5	buah	2	buah	2	buah	100.00	%	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	buah	7	buah	70.00	%
																Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
4	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas yang diadakan	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00	%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	60	bulan	83.33	%
																Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	98	buah	31	buah	34	buah	34	buah	100.00	%	Pengadaan Mebeleur	0	buah	85	buah	86.73	%

4	01	02	14	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer dan perlengkapannya	79	buah	56	buah	10	buah	10	buah	100.00	%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	buah	66	buah	83.54	%
4	01	02	15	Pengadaan Alat alat Studio	Jumlah alat alat studio yang diadakan	44	buah	9	buah	1	buah	1	buah	100.00	%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	buah	10	buah	22.73	%
4	01	02	15	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon	Jumlah instalasi listrik dan telpon yang diadakan	1	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100.00	%		0	Paket	1	Paket	100.00	%
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan Jaga Malam	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00	%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan	60	bulan	83.33	%
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	72	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00	%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	60	bulan	83.33	%
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100.00	%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	48	bulan	80.00	%
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100	%	45	%	100	%	100	%	50	%		#DIV/0!	%	53.83	%	50.65	%
																Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4	01	03	03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	171	stell	31	stell	0	stell	0	stell	0.00	%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	stell	31	stell	18.13	%

4	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	208	stell	138	stell	35	stell	35	stell	100.00	%	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0	stell	173	stell	83	%
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	49	%	100	%	67	%	66.67	%		100	%	58.04	%	58.04	%
																Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
4	01	05	03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	112	Orang	55	Orang	15	Orang	10	Orang	66.67	%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	65	Orang	58.04	%
4	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	100	%	50	%	100	%	100	%	100.00	%		100	%	75.00	%	73.89	%
																Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	10	Dok	6	Dok	2	Dok	2	Dok	100.00	%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00	Dok	8	Dok	80.00	%
4	01	06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	8	Dok	4	Dok	2	Dok	2	Dok	100.00	%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.00	Dok	6	Dok	75.00	%
4	01	06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	6	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	100.00	%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dok	4	Dok	66.67	%

		100	%	78.8	%							96.97	%	83.33	%
	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan lomba desa tingkat kecamatan	6	Kali	4								Kali	66.67	%	
Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	60	bulan	48	bulan	12	Bulan					bulan	100.00	%	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek	100	%	43.8	%	100	%	100				56.25	%	56.25	%
	Jumlah aparatur desa dan kecamatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	16	Keg	7	keg	2	Keg					9	keg	56.25	%

4	01	33		Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100	%	50	%	100	%	100	%	100.00	%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	75.00	%	75.00	%
																Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
4	01	33	04	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	48	bulan	24	bulan	12	Bulan	12	bulan	100.00	%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	bulan	36	bulan	75	%
4	01	35		Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Terbinanya Keagamaan Masyarakat	100	%	67	%	100	%	50	%	50.00	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	75.00	%	75.00	%
																Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
4	01	35	02	Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	12	kali	8	kali	2	Kali	1	kali	50.00	%	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	kali	9	kali	75.00	%
4	01	44		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	100	%	53	%	100	%	100	%	100.00	%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	73.33	%	73.33	%
																Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

4	01	44	02	Pembinaan Administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	60	bulan	32	bulan	12	Bulan	12	bulan	100.00	%	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	bulan	44	bulan	73	%
4	01	50		Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase jumlah musrenbang tingkat kecamatan	100	%	67	%	100	%	100	%	100.00	%		100	%	83.33	%	83.33	%
4	01	50	11	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah musrenbang tingkat kecamatan	6	kali	4	kali	1	Kali	1	kali	100.00	%	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	kali	5	kali	83	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Halong dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Halong yang telah tertuang dalam Renstra Kantor Kecamatan Halong Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C. 30
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan**

Indikator	SPM/ stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			75	75	80	80	80	80.97	82.75	86.13	82.94	86.45	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kantor Kecamatan Halong menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Kantor Kecamatan Halong Tahun 2020 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80	82,94	103,68%

Perolehan nilai realisasi 82,94 tersebut diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Umum kepada 25 responden yang membutuhkan pelayanan pada kantor Kecamatan Halong.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Halong Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berkriteria Sangat Tinggi, dengan capaian sebesar 103,68%, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Formula Perhitungan		
Total Nilai IKM yang dicapai	x	100%
Target IKM		

Hasil formula perhitungan diatas menunjukkan realisasi yang didapat sebesar 82,94 berdasarkan target kinerja tahun 2020 sebesar 80 didapat persentase capaiannya sebesar 103,68%. Hasil realisasi responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan aparatur melebihi dari target yang ditetapkan, salah satu hal disebabkan karena ada petugas yang melayani yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Halong serta adanya sistem evaluasi dan monitoring Pelayanan yang dilakukan dengan baik secara berkala. Selain itu juga karena adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

- a. Bidang Perizinan, meliputi :

1. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Pembuatan Izin Gangguan (HO);
4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Rekomendasi Izin Keramaian;
6. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Bidang non perizinan, meliputi :

1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
11. Fasilitasi Surat Kematian.

c. Realisasi Kegiatan

Diisi dengan rincian realisasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

a. Bidang Perizinan, meliputi :

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah	Keterangan
		Tahun 2020	
1.	Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	-	-
2.	Legalisasi pembuatan surat izin usaha perdagangan (UMKM)	8	-
3.	Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);	-	-
4.	Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	-	-
5.	Rekomendasi Izin Keramaian;	4	-
6.	Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100	-
7.	Penerbitan izin usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	-	-

b. Bidang non perizinan, meliputi :

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah	Keterangan
		THN 2020	

1.	Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);	283	Pergantian dan pembuatan KTP baru
2.	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);	344	Mengisi formulir perbaikan/pembuatan KK baru
3.	Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa /Kelompok/ Organisasi Kemasyarakatan;	232	-
4.	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;	-	-
5.	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;	12	-
6.	Legalisasi Surat Domisili Penduduk;	1	-
7.	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);	5	-
8.	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;	141	-
9.	Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,	103	-
10.	Surat Keterangan Dispensasi Nikah;	6	-
11.	Fasilitasi Surat Kematian.	101	-
12.	Layanan Tamu	529	-
13.	Legalisasi surat-surat lainnya	20	-

Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di dukung oleh Program:

a. Program Operasional Kecamatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yaitu dengan terbitnya Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Halong khususnya Petugas Teknis Pelaksana PATEN dituntut untuk lebih siap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun isu-isu penting dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Halong, yaitu:

- Masih lemahnya pemahaman akan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Tanggungjawab oleh sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Belum Optimalnya Pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Jenjang Pendidikan yang Tinggi.
- Masih rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian PNS, terutama dalam masalah jam kerja.
- Masih kurangnya kesadaran sebagian kecil warga yang mengajukan IMB
- Peningkatan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas.

Meskipun begitu, Perangkat Daerah Kecamatan Halong tetap optimis akan dapat menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya, hal ini mengingat masih adanya tantangan dan peluang untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, untuk tantangan yaitu :

- Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dan transparan.
- Adanya tuntutan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Sedangkan yang menjadikan peluang untuk bisa lebih meningkatkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, adalah :

- Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa.
- Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
- Tersedianya alokasi anggaran yang cukup.
- Tersedianya Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari segi jumlah maupun tingkat pendidikan.
- Adanya pelatihan/penjenjangan karir.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 18 (delapan belas sub kegiatan) yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Halong pada Tahun Anggaran 2022. Dimana diharapkan dengan terlaksana dan tercapainya target dari masing-masing Program dan Kegiatan tersebut, maka target Renja 2022 dan Renstra 2021-2026 dapat dicapai. Hal ini tentunya dapat berimbas kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk menyikapi hal ini tentunya kami dari Perangkat Daerah Kecamatan Halong akan terus melakukan koordinasi terutama dengan Bappeda Kabupaten Balangan. Sehingga nantinya apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Sikap SKPD Kantor Kecamatan Halong terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 di bawah ini :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Halong

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong	65,20	2,938,012,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong	65,20	2,938,012,900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	45,216,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	45,216,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Halong	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100%	4,006,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Halong	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100%	4,006,000	

Persentase dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan baik	Kecamatan Halong	Persentase dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan baik	100%	2,335,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Halong	Persentase dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan baik	100%	2,335,000	
Persentase laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan baik	Kecamatan Halong	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan baik	100%	38,875,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Halong	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan baik	100%	38,875,000	
Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2,560,322,900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2,560,322,900	
Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Kecamatan Halong	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	2,457,722,900	Persentase gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Halong	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	2,457,722,900	
Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kecamatan Halong	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	102,600,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Halong	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	102,600,000	
Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	40,880,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	40,880,000	
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Halong	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Kecamatan	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Daalam dan Luar Kabupaten	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 OP	40,880,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Daalam dan Luar Kabupaten	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 OP	40,880,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi Umum	12 Bulan	131,476,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi Umum	12 Bulan	131,476,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Halong	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Halong	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Halong	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Halong	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	7,987,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Halong	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	7,987,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	87 Kali	123,489,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	87 Kali	123,489,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	102,978,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		102,978,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Halong	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	34,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Halong	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	34,200,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Halong	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	68,778,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Halong	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	68,778,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	57,140,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		57,140,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Halong	Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi	100%	43,940,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Halong	Persentase kendaraan dinas operasional layak fungsi	100%	43,940,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Halong	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100%	13,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Halong	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100%	13,200,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	108,420,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	108,420,000	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-		
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Halong	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Halong	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	-		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	108,420,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	108,420,000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Halong	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	108,420,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Halong	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	108,420,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	100%	328,200,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	100%	328,200,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	328,200,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	328,200,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	12 Bulan	328,200,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Jumlah waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		328,200,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Halong	Jumlah waktu Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Halong	Jumlah waktu Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	9,015,600	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	9,015,000	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 Bulan	9,015,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 Bulan	9,015,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector	100%	9,015,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector	100%	9,015,000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	149,940,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	149,940,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100%	149,940,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100%	149,940,000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Halong	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	5 Keg	149,940,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	5 Keg	149,940,000	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Skor IDM Desa	0,6843	64,865,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Skor IDM Desa	0,6843	64,865,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	64,865,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	64,865,000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100%	57,300,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap	100%	7,565,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Kecamatan	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	100%	7,565,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kantor Kecamatan	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	100%	7,565,000	
	JUMLAH				3,598,452,900					3,598,452,900	

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun SKPD lain yang terkait langsung dengan program kegiatan masyarakat diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Halong, untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang terkait. Namun untuk usulan tersebut masyarakat wilayah Kecamatan Halong melalui Musrenbang desa atau Musrenbang Tk. Kecamatan, sebagian besar usulan program/kegiatan didominasi oleh kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Sehingga yang paling berperan dalam artian SKPD penanggung jawabnya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong dalam hal usulan ini, ada beberapa usulan yang programnya dapat dikaji atau ditelaah oleh dinas terkait .

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.32:

Tabel T-C. 32
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi(Desa)	Volome	Pagu Rp.	SKPD Penanggung Jawab
1.Kecamatan Halong									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Gedung serbaguna	Masyarakat	Desa Halong RT .03	1 buah		Dinas PU
2. Desa : Kapul									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jembatan Gantung Penghubung Antara Desa Hauwai menuju Balawan	Masyarakat	Kapul RT 04	75 m		Dinas PU
3. Desa : Binju									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pagar Kantor Desa	Masyarakat	Binju RT 01	1 Paket		Dinas PU
4. Desa : Tabuan									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Lapangan Futsal	Masyarakat	Tabuan RT 03	30 x 40 m		Dinas PU
5. Desa : Marajai									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Lanjutan Pengaspalan Jalan poros Desa	Masyarakat	Marajai RT 01	1500 m		Dinas PU
6. Desa : Puyun									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pembangunan Kantor Desa	Masyarkat	Desa Puyun RT 01	1 Buah		Dinas PU

7. Desa : Buntu Pilanduk									
1			Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Bronjung di sekitar Jembatan Besi	Masyarakat	Buntu Pilanduk RT 01	30 m x 3 m		Dinas PU
8. Desa : Liyu									
1			Pembangunan Infrastruktur al Pedesaan	Pengarasan jalan dan jembatan tembus Upau	Masyarakat	Desa Liyu RT.04	6,5 Km		Dinas PU
9. Desa : Halong									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pengaspalan Jalan Depan Puskesmas Halong	Masyarakat	Halong RT 05	250 m		Dinas PU
10. Desa : Hauwai									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pembangunan Kantor Desa (Baru)	Masyarakat	Hauwai RT 03	1 Buah		Dinas PU
11. Desa : Mantuyan									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Peningkatan Jalan dari simpang 3 Rt. 01 Ke Jembatan Beton	Masyarakat	Desa Mantuyan RT. 01	+ 300 Km		Dinas PU
12. Desa : Sumber Agung									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pengaspalan Jalan Poros Desa	Masyarakat	Sumber Agung RT 03 dan RT 04	2000 m		Dinas PU
13. Desa : Baruh Panyambaran									
1			Pembangunan Infrastruktur pedesaan	Perbaikan Jalan Menuju TK Al-Busra	Masyarakat	Baruh Panyambaran RT 01	300 m		Dinas PU

14. Desa : Mauya									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jalan Lingkungan (Cor Beton)	Masyarakat	Mauya RT 02 – RT 03	700 m		Dinas PU
15. Desa : Gunung Riut									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rehab Jembatan dan Bronjung	Masyarakat	G. Riut RT 03	60 m		Dinas PU
16. Desa : Binuang Santang									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pengaspalan jalan Mauya Binuang Santang	Masyarakat	Desa Binuang Santang RT.01	3 Km		Dinas PU
17. Desa : Aniungan									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rumah Babinsa	Masyarakat	Aniungan RT 01	1 Buah		Dinas PU
18. Desa : Mamigang									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Lanjutan Pengaspalan	Masyarakat	Mamigang RT 02 – RT 06	3 km		Dinas PU
19. Desa : Binjai Punggal									
1			Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Gedung TPA	Masyarakat	Binjai Punggal RT 01	8x12		Dinas PU
20. Desa : Suryatama									
1			Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Jalan (Cor Betton)	Masyarakat	Desa Suryatama RT.07	700 m		Dinas PU

			Pedesaan						
21. Desa : Padang Raya									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jembatan Singkahan	Masyarakat	Padang Raya RT 01	52 m		Dinas PU
22. Desa : Bangkal									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pembuatan jembatan gantung	Masyarakat	Desa Bangkal RT.03	30 m		Dinas PU
23. Desa : Uren									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jembatan Gantung	Masyarakat	Uren RT 02	60 m		Dinas PU
24. Desa : Karya									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pelebaran Jalan Anggin - Puyun	Masyarakat	Karya RT 01 – Rt 03	3 km		Dinas PU
25. Desa : Mamantang									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jalan Desa Mamantang - Uren	Masyarakat	Desa Mamantang	8000 m		Dinas PU
26. UPT PKM Uren									
1			Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pustu Libaru Sungkai	Masyarakat	Desa Binuang Santang	1 Buah		Dinas PU
27. UPT PKM Halong									

1			Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	Pembuatan Drainase Dari lapangan sepak Bola Ke PUSKESMAS halong	Masyarakat	Desa Halong	P.100m		Dinas PU
---	--	--	-------------------------------------	---	------------	-------------	--------	--	----------

Musrenbang Kecamatan Halong Tahun 2021 Untuk Perencanaan Tahun 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada dasarnya kebijakan nasional bersifat makro, baik itu dalam pembangunan maupun perekonomian. SKPD Kecamatan Halong dalam menentukan prioritas program/kegiatan lebih mengutamakan perbaikan kelembagaan sebagai modal awal mendukung lancarnya proses pelayanan. Secara kasat mata, program/kegiatan SKPD Kecamatan Halong keluar dari kebijakan nasional, namun secara filosofi tetap berada digaris depan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan renja SKPD pada dasarnya sama dengan tujuan Renstra SKPD, yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Halong Tahun 2021
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Halong Tahun 2022
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan
5. Terciptanya suasana lingkungan yang kondusif.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2020, maka jika dilihat secara riil tujuan dari Renstra SKPD ini berjalan dengan lancar, sebab program/kegiatan yang dicanangkan merupakan penjabaran dari renstra yang ada, sehingga terjadi sinkronisasi yang tentu diharapkan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta sarana dan prasarana pendukungnya
2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2022 terkait dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Halong didasarkan kepada Renstra Kantor Kecamatan Halong Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan sesuai dengan Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 yaitu:

“ *Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara*” dengan Tujuan “*Meningkatnya kualitas pelayanan public dan meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan*”. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan indikator

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN	TARGET AKHIR
			2020	2022
Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 yaitu “ <i>Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara</i> ”				
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	82,94	82
Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan	Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan	Skor IDM desa		0,6843

3.3 Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Kantor Kecamatan Halong dalam Renja 2022 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kantor Kecamatan Halong 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Balangan.

Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Halong untuk Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan pagu Indikatif APBD sebesar Rp. 3.598.452.900,-

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kantor Kecamatan Halong di Tahun 2022 yang selaras dengan tujuan sasaran renja yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan kemandirian desa lingkup kecamatan adalah:

1. Program Operasional Kecamatan
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan Program pendukung adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Untuk keterangan lebih jelas, dapat dilihat pada table T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Halong

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(6)
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong		65,20	2,938,012,900			68,20	3,359,770,000
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	45,216,000			100%	11,775,000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	Kecamatan Halong	100%	4,006,000	APBD		100%	4,200,000

7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan baik	Kecamatan Halong	100%	2,335,000	APBD		100%	2,450,000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan baik	Kecamatan Halong	100%	38,875,000	APBD		100%	5,125,000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	2,560,322,900			12 Bulan	2,942,050,000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Kecamatan Halong	100%	2,457,722,900	APBD		100%	2,835,000,000
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kecamatan Halong	100%	102,600,000	APBD		100%	107,050,000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	40,880,000			12 Bulan	75,600,000
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Halong			APBD		23 Stel	35,500,000

7	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Daalam dan Luar Kabupaten	6 OP	40,880,000	APBD		6 OP	40,100,000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi Umum		12 Bulan	131,476,000			12 Bulan	162,285,000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Halong					65 Buah	3,500,000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Halong					2 Buah	25,000,000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Halong	12 Bulan	7,987,000	APBD		12 Bulan	8,785,000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Dalam dan Luar Daerah	87 Kali	123,489,000	APBD		95 Kali	125,000,000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rumah Dinas		-				-

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	Kecamatan Halong	100%	13,200,000	APBD	100%	13,860,000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82	108,420,000		83	113,850,000
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		12 Bulan	-			-
7	01	02	2	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Halong					
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			-			-
						Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Halong					

7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	108,420,000			100%	113,850,000
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kecamatan Halong	100%	108,420,000	APBD		100%	113,850,000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		100%	328,200,000			100%	335,000,000
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		100%	328,200,000			100%	335,000,000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Halong	12 Bulan	328,200,000	APBD		12 Bulan	335,000,000
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-				-
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah waktu Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Halong						

7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)		100%	9,015,000			100%	9,500,000
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah waktu koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		12 Bulan	9,015,000			12 Bulan	9,500,000
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	Kecamatan Halong	100%	9,015,000	APBD		100%	9,500,000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	149,940,000			100%	160,000,000
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		100%	149,940,000			100%	160,000,000
7	01	05	2	01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Halong	5 Keg	149,940,000	APBD		5 Keg	160,000,000

7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Skor IDM Desa		0,6643	64,865,000			0,7043	68,115,000
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100%	64,865,000			100%	68,115,000
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan						-
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap	Kantor Kecamatan	100%	57,300,000	APBD		100%	60,165,000
7	01	06	2	01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu	Kantor Kecamatan	100%	7,565,000	APBD		100%	7,950,000
						JUMLAH				3,598,452,900				4,046,235,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kantor Kecamatan Halong merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Halong. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kantor Kecamatan Halong kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Halong. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Halong.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.938.012.900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.216.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.322.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.880.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.476.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.978.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.140.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.420.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	108.420.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	328.200.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	328.200.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.015.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.015.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	149.940.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	149.940.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	64.865.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.865.000
JUMLAH	3.598.452.900

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Halong adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Halong untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Dan merupakan manifestasi dari respon Kantor Kecamatan Halong terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Halong ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Halong, 08 Juli 2021

Camat Halong,



SURATMAN, S.Kep, MM
NIP. 497100291991011002